

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
PRAKATA.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	x
INTISARI.....	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Tinjauan Pustaka	9
1.5.1. Pendekatan Hukum atas Hak Kewarganegaraan.....	9
1.5.2. Pendekatan Sosial dan Politik atas Hak Kewarganegaraan.....	11
1.6. Kerangka Teori	14
1.6.1. Teori Tindakan Komunikatif.....	14
1.6.2. Teori Pelabelan (<i>Labelling Theory</i>)	17
1.6.3. Stigmatisasi	19
1.6.4. Hak Kewarganegaraan	22
1.7. Metode Penelitian	24
1.7.1. Model Penelitian	25
1.7.2. Lokasi Penelitian	25
1.7.3. Teknik Pemilihan Informan	26
1.7.4. Jenis Data	26
1.7.5. Teknik Pengumpulan Data	27
1.7.5.1. Observasi	27
1.7.5.2. Wawancara	27
1.7.6. Teknik Pengolahan Data	28
1.7.7. Teknik Analisis Data	29
BAB II KONTEKS WILAYAH, KEHIDUPAN MASYARAKAT, DAN KONDISI SOSIAL–POLITIK PEDESAAN.....	30
2.1. Konteks Kabupaten Probolinggo	30
2.1.1. Konteks Geografis dan Wilayah Administrasi.....	31
2.1.1.1. Kabupaten Probolinggo bagian Utara	31
2.1.1.2. Kabupaten Probolinggo bagian Timur	33
2.1.1.3. Kabupaten Probolinggo bagian Selatan	34
2.1.1.4. Kabupaten Probolinggo bagian Barat	36
2.1.2. Konteks Kemasyarakatan	37
2.1.2.1. Kondisi Sosial	37
2.1.2.2. Kondisi Ekonomi.....	38
2.1.2.3. Kondisi Politik.....	39
2.1.2.4. Kondisi Budaya	40

2.1.2.5. Kondisi Kekerabatan	41
2.2. Sekilas tentang Forum Silaturahmi Mantan Tahanan dan Narapidana.....	43
2.2.1. Aktivitas Organisasi	44
2.2.1.1. Jaringan Anggota.....	44
2.2.1.2. Jaringan Politik.....	46
2.2.1.3. Jaringan Sosial Masyarakat	47
2.2.2. Hubungan Organisasi dengan Lembaga Eksternal.....	48
2.2.2.1. Hubungan dengan Aparatur Pemerintah dan Instansi	49
2.2.2.2. Hubungan dengan Partai Politik.....	50
2.3. Penjabaran Lokus Jangkauan Penelitian	51
2.3.1. Deskripsi Umum Lokasi dan Informan Penelitian	51
2.3.1.1. Wilayah Desa A	51
2.3.1.2. Wilayah Desa B.....	53
2.3.1.3. Wilayah Desa C.....	55
2.3.1.4. Wilayah Desa D	56
2.3.1.5. Wilayah Desa E.....	57
2.3.1.6. Wilayah Desa F	59
2.3.2. Konteks Sosial dan Politik Lokasi Penelitian	60
2.3.2.1. Relasi Feodalisme	61
2.3.2.2. Relasi Patron-Klien	64
2.3.2.3. Relasi Kooptasi	66
2.3.2.4. Relasi Kekerabatan.....	68
2.3.2.5. Relasi Sosial Pertemanan	70
BAB III STIGMA SOSIAL, HAK KEWARGANEGARAAN, DAN	
PEMBATASAN PARTISIPASI POLITIK MANTAN NARAPIDANA	73
3.1. Label Sosial dan Stigmatisasi Mantan Narapidana.....	73
3.1.1. Konstruksi Identitas Mantan Narapidana	74
3.1.2. Posisi Sosial Mantan Narapidana di Masyarakat	78
3.1.3. Konsekuensi Mantan Narapidana.....	81
3.1.3.1. Konsekuensi Sosial Ekonomi.....	82
3.1.3.2. Konsekuensi Keluarga.....	84
3.1.3.3. Konsekuensi Kewarganegaraan	87
3.1.4. Reintegrasi Mantan Narapidana	91
3.1.5. Transisi Peran Kehidupan dan Desensitisasi Kejahatan	93
3.1.6. Perjuangan Destigmatisasi Mantan Narapidana.....	96
3.1.7. Hambatan Reintegrasi dan Destigmatisasi Mantan Narapidana	99
3.2. Pembatasan Hak Kewarganegaraan Mantan Narapidana	101
3.2.1. Esensi Sejarah Pencabutan Hak Mantan Narapidana.....	102
3.2.2. Landasan Hukum Pembatasan Hak Politik Mantan Narapidana.....	105
3.2.3. Pembatasan Hak Politik untuk Mantan Narapidana.....	110
3.2.4. Dukungan Publik Mencabut Hak Politik Mantan Narapidana.....	112
3.3. Kematian Sipil <i>vis-a-vis</i> Kebebasan Sipil Mantan Narapidana	114
3.3.1. Hukuman Pasca-pemasyarakatan	115
3.3.2. Represi Negara dan Paket Pelanggaran.....	119
3.3.3. Fantasi Publik untuk Pencabutan Hak Politik	122

3.4. Tantangan dan Diskursus Pencabutan Hak Politik Mantan Narapidana.....	126
3.4.1. Kebijakan Politik dan Limitasi Kewarganegaraan	127
3.4.1.1. Kebijakan Publik dan Sistem Peradilan	128
3.4.1.2. Pandangan Pemerintah atas Kebijakan Publik	130
3.4.2. Partisipasi dan Restorasi Hak Kewarganegaraan Mantan Narapidana ...	132
3.4.2.1. Menimbang tentang Perubahan Kebijakan	134
3.4.2.2. Diskursus Perjuangan Hak Kewarganegaraan	139
3.4.2.3. Partisipasi Organisasi untuk Mengembalikan Hak Politik.....	143
3.4.2.4. Dukungan Jaringan Sosial dalam Restorasi Hak Sipil	145
3.4.2.5. Prosedur dalam Merestorasi Hak Politik Mantan Narapidana	148

BAB IV MENILIK KEMBALI KEHIDUPAN POLITIK ELEKTORAL

MANTAN NARAPIDANA DI TINGKAT DESA	153
4.1. Manuver Politik Mantan Narapidana dalam Konteks Pedesaan	153
4.1.1. Patron-klien Jalan Kesuksesan Mantan Narapidana	153
4.1.2. Kooptasi Masyarakat dan Preservasi Wilayah Desa	156
4.1.3. Kapasitas Pertemanan untuk Penjaringan Suara	161
4.2. Label Sosial sebagai Instrumen Kemenangan Mantan Narapidana.....	163
4.2.1. Label Sosial Sarana Supremasi Kekuasaan.....	164
4.2.2. Kelompok Terstigma dan Solidaritas Jaringan	167
4.2.3. Distorsi Label Sosial Masyarakat.....	171
4.3. Hak Kewarganegaraan dan Praktik Politik Mantan Narapidana di Desa	175
4.3.1. Rendahnya Kapabilitas Masyarakat	180
4.3.2. Kriminalitas di Masyarakat dan Lazimnya Kultur Menyimpang.....	182
4.3.3. Penegasian Status Politik Mantan Narapidana	187
4.3.4. Pengungkapan Status sebagai Akhir Limitasi Politik	190
4.3.5. Antipati Masyarakat terhadap Beberapa Kasus Pidana.....	191
4.4. Diskursus, Interaksi Sosial, dan Konsesi Publik.....	196
4.5. Menyelisik Restorasi Hak, Partisipasi Politik, dan Demokrasi Deliberatif .	202
4.6. Demokrasi Deliberatif: Sebuah Refleksi Kritis	218
4.6.1. Urgensi Demokrasi Deliberatif di Indonesia.....	219
4.6.2. Tantangan Demokrasi Deliberatif	220
4.6.3. Kritik atas Paradigma Habermas	221
4.6.3.1. Konsensus Ideal.....	222
4.6.3.2. Moral-pluralis.....	223
4.6.3.3. Kekuasaan Hegemonik.....	224
4.6.4. Kontekstualisasi Kritik	226

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI **228** |

5.1. Proses Perubahan Status dan Bentuk Siasat Politik Mantan Narapidana ...	228
5.2. Relatifnya Posisi Sosial Mantan Narapidana dalam Struktur Masyarakat ..	230
5.3. Sokongan Jaringan untuk Pemenangan Menjadi Kepala desa.....	231
5.4. Limitasi Studi	233
5.5. Rekomendasi	233
DAFTAR PUSTAKA	235